

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS TESIS	I
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS	II
ABSTRAKSI	III
<i>ABSTRACT</i>	IV
PRAKATA.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR SINGKATAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Konteks Penelitian.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Anggaran dan anggaran sektor publik.....	11
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	14
2.1.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	19
2.1.4 Satuan Kerja (Satker)	21
2.1.5 Pejabat perbendaharaan negara	22
2.1.5.1 Pengguna Anggaran (PA)	23
2.1.5.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....	23
2.1.5.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	24
2.1.5.4 Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	25
2.1.5.5 Bendahara Pengeluaran.....	26
2.1.5.6 Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).....	27
2.1.6 Pencairan anggaran belanja	27

2.1.7	Tagihan negara mekanisme kontraktual	33
2.2	Tinjauan Pustaka.....	36
BAB III DISAIN PENELITIAN.....		39
3.1	Profil Ringkas Organisasi	39
3.1.1	Struktur organisasi.....	39
3.1.2	Struktur pengelolaan keuangan	41
3.2	Rasionalitas Objek Penelitian	47
3.3	Jenis Penelitian	48
3.4	Jenis dan Sumber Data	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6	Analisis Data.....	51
3.7	Validitas dan Reliabilitas Data	54
BAB IV ANALISIS DAN DISKUSI.....		57
4.1	Faktor Keterlambatan Pengajuan Hak Tagih dari Rekanan	57
4.1.1	Ketidaksiplinan pihak ketiga/rekanan	58
4.1.1.1	Keengganan pihak ketiga/rekanan mengajukan tagihan per perikatan 59	
4.1.1.2	Kepercayaan pihak ketiga/rekanan kepada pemerintah	62
4.1.1.3	Perbedaan prioritas antara pihak ketiga/rekanan dan pemerintah... 63	
4.1.2	Kelemahan kondisi internal pihak ketiga/rekanan	64
4.1.2.1	Kendala sistem administrasi di pihak ketiga/rekanan	64
4.1.2.2	Kendala di luar kemampuan pihak ketiga/rekanan	67
4.1.2.3	Kendala komposisi SDM pihak ketiga/rekanan.....	68
4.1.3	Ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.....	70
4.2	Faktor Keterlambatan Penyelesaian SPP oleh PPK.....	74
4.2.1	Ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.....	76
4.2.2	Kelemahan tahap awal implementasi sistem aplikasi monitoring tagihan 77	
4.2.3	Peningkatan volumen tagihan pada akhir tahun anggaran	79
4.3	Faktor Keterlambatan Penyelesaian SPM oleh PPSPM	81
4.3.1	Ketidaksiplinan dalam mengikuti proses bisnis	82
4.3.2	Peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran	84
4.4	Rencana Tindakan untuk Mengatasi Masalah Keterlambatan Penyelesaian Tagihan Negara.....	85
4.4.1	Memastikan proses penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktual sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 190/PMK.05/2012	87
4.4.2	Memperluas sistem pengendalian internal pada proses penyelesaian tagihan kepada negara	89
4.4.3	Mengubah struktur organisasi pengelola keuangan	93
BAB V KONKLUSI DAN REKOMENDASI		98
5.1	Konklusi.....	98

5.1	Rekomendasi	104
5.2	Keterbatasan	105

REFERENSI	107
-----------------	-----

LAMPIRAN